

S
952.13507

23611/24162



Hen

a

2012

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI BEBERAPA
PASAR KOTA PALEMBANG**



Skripsi Oleh :

**HENDY SEPTIAWAN
NIM 01061002075**

EKONOMI PEMBANGUNAN

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat - syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
2012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HENDY SEPTIAWAN
NIM : 01061002075
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI
BEBERAPA PASAR KOTA PALEMBANG

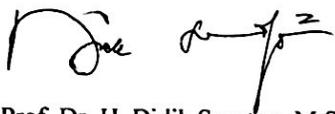
Telah diuji didepan panitia ujian komprehensif pada tanggal 4 Mei 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 4 Mei 2012

Ketua,

Anggota,

Anggota,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196402161989032001



Bambang Bernby S, M.A., Ph. D
NIP. 195306161980111004



Drs. M. Syirad Saleh, M.Si
NIP. 195309021984031001

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Azwardi, M.Si
NIP. 196805181993031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendy Septiawan
NIM : 01061002075
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI BEBERAPA PASAR KOTA PALEMBANG

Pembimbing

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
Anggota : Bambang Bemby Subiakto, M.A, Ph. D
Telah diuji : 04 Mei 2012

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Palembang, 10 Mei 2012

Pembuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
PADA KEHIMPUNAN BANGGA
TOL
71E33AAF951106859
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP



Hendy Septiawan

NIM. 01061002075

SURAT PERNYATAAN

Kami selaku dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi dari mahasiswa yang bernama di bawah ini:

Nama : Hendy Septiawan
NIM : 01061002075
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Judul : Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Beberapa Pasar Kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 10 Mei 2012

Pembimbing Skripsi,
Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003



Bambang Bemby S, M.A, Ph. D
NIP.195306161980111004

Motto

- Masalah dari suatu permasalahan bukan terletak pada permasalahannya yang menjadi masalah adalah bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut.
- Lebih baik gagal hari ini untuk berhasil di kemudian hari daripada tidak pernah mencoba sama sekali.

Kupersembahkan kepada

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tuaku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Beberapa Pasar Kota Palembang" sebagai salah satu syarat untuk dapat meraih gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik moril, doa maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. H. Syamsurijal A.K, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Azwardi, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Bapak Drs. Nazeli Adnan, M.Si, Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.
5. Bapak Drs. Harunurasyid, M.com, Pembimbing Akademik.
6. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si, Pembimbing I Skripsi.
7. Bapak Bambang Bemby Subiakto, M.A, Ph. D, Pembimbing II Skripsi.
8. Bapak Drs. M. Syirod Saleh, M.Si, selaku dosen penguji yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
9. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Kedua orang tuaku yang tercinta dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril dan materil.
11. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
12. Teman-teman sejawat seangkatan di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Banyak sekali hambatan yang dihadapi penulis dalam proses penulisan skripsi ini, tetapi berkat kuasa-Nya dan bantuan baik moral maupun materi dari pihak-pihak yang mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

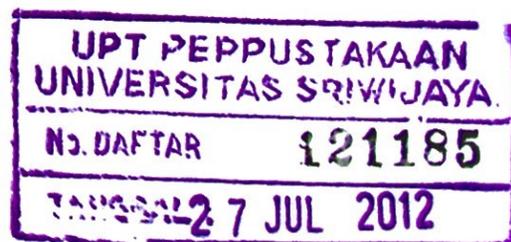
Masih banyak sekali kelemahan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan penulis, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Semoga nantinya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Inderalaya, 10 Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAKSI	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	18
2.1.1. Peranan Pemerintah dalam Perekonomian	18
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.1.3. Retribusi Daerah	22
2.1.4. Retribusi Pasar.....	30
2.2. Penelitian Terdahulu	31
2.3. Kerangka Konseptual Pemikiran	36
2.4. Hipotesis	37
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.2. Sumber Data.....	38



3.3.	Populasi dan Sampel.....	38
3.3.1.	Populasi.....	38
3.3.2.	Sampel.....	39
3.4.	Metode Analisis.....	40
3.4.1.	Analisis Efektifitas.....	40
3.4.2.	Analisis Efisiensi.....	41
3.4.3.	Analisis Potensi.....	42
3.4.4.	Analisis Uji beda Rata-Rata.....	42
3.5.	Definisi Operasional Variabel.....	43

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Hasil penelitian.....	45
4.1.1.	Gambaran Umum Kota Palembang.....	45
4.1.2.	Kependudukan.....	46
4.1.3.	Struktur Ekonomi Kota Palembang.....	47
4.1.4.	Dasar Pengenaan Tarif Retribusi Pasar.....	49
4.1.5.	Perkembangan Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Palembang.....	50
4.2.	Pembahasan.....	55
4.2.1.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Naik Turunnya Penerimaan di Beberapa Pasar Kota Palembang.....	55
4.2.2.	Analisis Efektifitas Retribusi Pasar.....	58
4.2.3.	Analisis Efisiensi Retribusi Pasar.....	62
4.2.4.	Analisis Potensi Retribusi Pasar.....	65
4.3.	Uji Beda Rata-Rata Potensi dan Realisasi Penerimaan di Beberapa Pasar Kota Palembang.....	67
4.3.1.	Uji Beda Rata-Rata Potensi dan Realisasi Pasar Cinde....	67
4.3.1.1.	Uji Hipotesis dengan Metode Wilcoxon Signed Ranks Test.....	68
4.3.2.	Uji Beda Rata-Rata Potensi dan Realisasi Pasar 10 Ulu....	69
4.3.2.1.	Uji Hipotesis dengan Metode Wilcoxon Signed Rank Test.....	70

4.3.3. Uji Beda Rata-Rata Potensi dan Realisasi Pasar Bukit Kecil.....	70
4.3.3.1. Uji Hipotesis dengan Metode Wilcoxon Signed Ranks Test.....	71
4.3.4. Uji Beda Rata-Rata Potensi dan Realisasi Pasar 16 Ilir.....	72
4.3.4.1 Uji Hipotesis dengan Metode Wilcoxon Signed Ranks Test.....	73
4.3.5. Uji Beda Rata-Rata Potensi dan Realisasi Pasar Retail Jakabaring.....	73
4.3.5.1. Uji Hipotesis dengan Metode Wilcoxon Signed Ranks Test.....	74
4.3.6. Uji Beda Rata-Rata Potensi dan Realisasi Pasar Lemabang.....	75
4.3.6.1. Uji Hipotesis dengan Metode Wilcoxon Signed Ranks Test.....	76

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	78
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sumber-sumber PAD Kota Palembang Tahun 2006-2010.....	6
Tabel 1.2.	Perbandingan Antara Penerimaan Beberapa Retribusi Daerah dengan Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Palembang tahun 2006-2010.....	7
Tabel 1.3.	Rasio Perbandingan Retribusi Pasar Dengan PAD Kota Palembang Tahun 2006.....	8
Tabel 1.4.	Jumlah Petak dan Los di Pasar tradisional sekota Palembang yang dikelola oleh PD.Pasar Palembang Jaya.....	11
Tabel 1.5.	Penerimaan dari beberapa pasar yang dikelola oleh PD.Pasar Palembang Jaya Tahun 2006-2010.....	12
Tabel 1.6.	Penerimaan beberapa pasar tradisional yang memiliki jumlah petak dan los yang lebih banyak dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional lainnya.....	14
Tabel 4.1.	Data Kecamatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Kota Palembang.....	46
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Kota Palembang dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tahun 2006-2010.....	47
Tabel 4.3.	Struktur Ekonomi Kota Palembang menurut sektor primer, sekunder, dan tersier dengan migas.....	48
Tabel 4.4.	Pengenaan tarif jasa pengelolaan Retribusi Pasar Kota Palembang.....	50
Tabel 4.5.	Target dan realisasi retribusi pasar di Kota Palembang tahun 2006-2010.....	51
Tabel 4.6.	Jumlah pasar, petak, dan pedagang di pasar tradisional Kota Palembang tahun 2001-2010.....	53

Tabel 4.7.	Distribusi Persentase PDRB Kota Palembang 2006-2010 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dengan Migas).....	55
Tabel 4.8.	Perbandingan Retribusi Pasar dengan PDRB sektor jasa-jasa Tahun 2006-2010 atas dasar harga konstan 2000.....	57
Tabel 4.9.	Efektifitas retribusi pasar di Kota Palembang tahun anggaran 2006-2010.....	59
Tabel 4.10.	Tingkat Efisiensi Retribusi Pasar Di Kota Palembang Tahun 2006-2010.....	64
Tabel 4.11.	Potensi penerimaan di beberapa pasar Kota Palembang.....	66
Tabel 4.12.	Ringkasan Hasil Pengujian.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Sumber-sumber PAD Kota Palembang Tahun 2006- 2010.....	6
Gambar 1.2.	Perbandingan Retribusi Pasar Dengan PAD Kota Palembang.....	9
Gambar 1.3.	Penerimaan dari beberapa pasar yang dikelola oleh PD.Pasar Palembang Jaya Tahun 2006-2010.....	13
Gambar 2.1.	Kerangka Konseptual Pemikiran.....	37
Gambar 4.1.	Target dan realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Palembang.....	52
Gambar 4.2.	Efektifitas retribusi pasar di Kota Palembang tahun anggaran 2006-2010.....	61

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI BEBERAPA PASAR KOTA PALEMBANG

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan retribusi pasar di beberapa pasar Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data yang diambil dari beberapa pasar yang ada di Kota Palembang berupa data tarif yang dikenakan pada kios, los, dan plataran dan pungutan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi di beberapa pasar Kota Palembang sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data penerimaan retribusi pasar, data penerimaan dan data biaya operasional pengelolaan serta data jumlah kios, los, dan plataran dari beberapa pasar Kota Palembang. Analisis yang digunakan adalah analisis efektifitas, analisis efisiensi, analisis potensi, dan uji beda rata-rata (*Wilcoxon Signed Ranks Test*).

Berdasarkan hasil penelitian, potensi yang ada di beberapa pasar Kota Palembang sangat besar akan tetapi pungutan retribusi yang dilakukan belum maksimal karena masih banyaknya kios, los, dan plataran yang kosong serta banyaknya pedagang yang menempati plataran secara tidak tetap sehingga realisasi penerimaan tidak sesuai dengan potensi yang ada di beberapa pasar. Hasil uji beda rata-rata menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan di beberapa pasar Kota Palembang, yaitu realisasi penerimaan lebih rendah dari potensi. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kios, los, dan plataran yang kosong sehingga pungutan retribusi di beberapa pasar Kota Palembang belum maksimal.

Kata Kunci: Penerimaan Retribusi Pasar



AN ANALYSIS OF THE MARKET RETRIBUTION REVENUES AT SOME MARKETS IN PALEMBANG

ABSTRACT

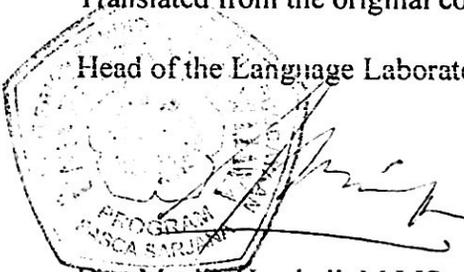
This study was aimed at analyzing the market retribution revenues at some markets in Palembang. Primary and secondary data were used in this study. The former was taken from some markets in Palembang in the form of tariff data subjected to the kiosk, stall, and *plataran* (unoccupied spaces at market usually used for various business purposes). The later was taken from the data of market retribution revenues, data of revenues and operational cost management, and data of the number of kiosk, stalls, and *plataran*. The Wilcoxon Signed Ranks Test was used to analyze the market retribution revenues in terms of its effectiveness, efficiency, potentiality.

This study showed that there were great potential revenues at some markets in Palembang. Nevertheless, the retribution revenues were not maximally received because there were many kiosk, stalls, and *plataran* which were not rent and there were also many merchants who did not permanently rent the kiosk, stalls, and *plataran* so that the actual retribution revenues were not in accordance with the existing potential in some markets. The Wilcoxon Signed Ranks Test showed there was a significant difference between the potential retribution revenues and actual retribution revenues in some markets in Palembang. It was because there were many kiosk, stalls, and *plataran* which were not rent so that the actual revenues were lower than the potential ones.

Keywords: Market Retribution Revenues

Translated from the original copy

Head of the Language Laboratory, Graduate School of Sriwijaya University



Drs. Mustlih Hambali, M.LIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR menyatakan bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melaksanakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan yang dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian otonomi tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah otonom agar semakin baik. Guna menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah

yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah berhak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam kewenangan daerah. Kewenangan daerah merupakan wewenang yang dimiliki pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan menjadi pemerintah pusat. Dalam UU tersebut kewenangan daerah terbagi menjadi kewenangan pemerintah daerah dan provinsi (pasal 13 UU N0 32 Tahun 2004) dan kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota (pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan

(urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah (Riduansyah, 2003 : 49-50).

Pada UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan :

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintah yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada daerah.

Pembentukan Undang-Undang tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows functions* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah.

Menurut Koswara yang dikutip oleh Irfan Setiawan (2008: 1) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada Pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Sesuai dengan yang diatur

dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah berhak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 adalah 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, 2) Dana perimbangan, 3) Pinjaman daerah, 4) Pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Pemerintah Daerah Kota Palembang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Sebagai daerah otonom, Kota Palembang dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah.

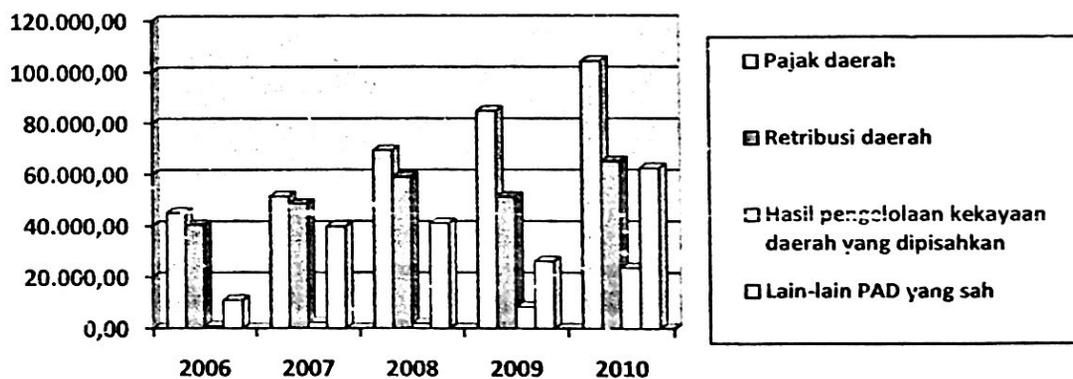
Seperti terlihat pada Tabel 1.1 memperlihatkan sumber-sumber PAD Kota Palembang tahun 2006-2010 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sumber-sumber PAD Kota Palembang Tahun 2006-2010 (dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah			
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah
2006	45.057,34	40.375,91	821,38	10.948,19
2007	51.486,86	48.572,15	2.366,82	39.702,46
2008	69.367,59	59.055,02	1.951,49	41.009,44
2009	84.696,56	51.274,32	8.402,35	26.167,40
2010	104.047,31	65.175,50	23.533,11	62.437,71

Sumber : Dispenda, Sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Palembang

Tahun 2006-2010 (data diolah)



Gambar 1.1

Sumber-sumber PAD Kota Palembang Tahun 2006-2010 (dalam jutaan Rupiah)

Dari tabel 1.1 diatas terlihat sumber-sumber pendapatan asli daerah kota Palembang. Penerimaan terbesar adalah penerimaan dari pajak daerah yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian disusul oleh penerimaan dari retribusi daerah, hanya saja pada tahun 2009 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp 59.055.021.400,00 yang mengalami penurunan menjadi Rp. 51.274.328.286,00

Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan dari retribusi daerah. Adapun jenis retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang adalah retribusi pasar seperti terlihat pada Tabel 1.2 memperlihatkan perbandingan antara penerimaan beberapa retribusi daerah dengan penerimaan retribusi pasar di Kota Palembang Tahun 2006-2010, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perbandingan Antara Penerimaan Beberapa Retribusi Daerah
dengan Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Palembang tahun 2006-2010
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Tahun	Nama Retribusi				
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	Retribusi Pasar
1.	2006	12.523,39	4.167,28	2.479,92	2.437,09	2.558,15
2.	2007	15.964,90	3.987,58	2.751,74	1.852,06	2.901,14
3.	2008	20.397,38	4.779,55	3.037,44	2.386,13	3.042,38
4.	2009	20.161,75	4.555,54	2.948,17	3.382,88	5.358,48
5.	2010	32.536,15	4.451,59	3.094,07	3.590,07	5.954,11

Sumber: Dispenda Kota Palembang tahun 2011 (data diolah)

Dari tabel 1.2 diatas terlihat perbandingan antara penerimaan beberapa retribusi daerah terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Palembang. Pada

tahun 2007 Penerimaan terbesar adalah penerimaan dari retribusi izin mendirikan bangunan dan penerimaan terendah adalah penerimaan dari retribusi pasar.

Akan tetapi terjadi penurunan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yaitu pada tahun 2008 dari Rp. 20.397.385.290 menurun menjadi Rp. 20.161.757.975 pada tahun 2009. Sedangkan penerimaan retribusi pasar selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya walaupun jumlah penerimaannya tidak sebesar penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan.

Penerimaan retribusi pasar selalu meningkat selama 5 tahun terakhir. Seperti terlihat pada Tabel 1.3 memperlihatkan rasio perbandingan retribusi Pasar Dengan PAD Kota Palembang Tahun 2006-2010, yaitu sebagai berikut :

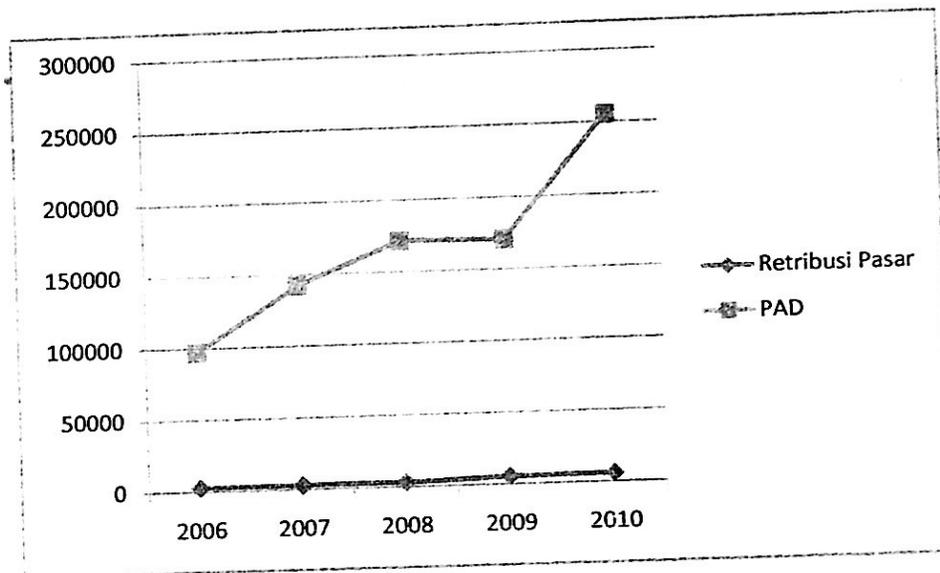
Tabel 1.3

Rasio Perbandingan Retribusi Pasar Dengan PAD Kota Palembang Tahun 2006-2010

No	Tahun	Penerimaan Retribusi Pasar (dalam Rp)	PAD Kota Palembang (dalam Rp)	Rasio Retribusi Pasar terhadap PAD (%)
1	2006	Rp 2.558.154.334	Rp 97.202.850.978,37	2,63 %
2	2007	Rp 2.901.142.007	Rp 142.128.319.304,47	2,04 %
3	2008	Rp 3.042.381.787	Rp 171.383.551.551,57	1,77 %
4	2009	Rp 5.358.488.272,60	Rp 170.540.649.161,73	3,14 %
5	2010	Rp 5.954.117.437,97	Rp 255.193.654.243,66	2,33 %

Sumber : Dispenda Kota Palembang Tahun 2010 (data diolah)

Gambar 1.2
Perbandingan Retribusi Pasar Dengan PAD Kota Palembang (dalam jutaan rupiah)



Dari Tabel 1.3 di atas dapat dilihat rasio perbandingan antara retribusi pasar dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Dapat diketahui setiap tahun penerimaannya mengalami perubahan, yaitu tahun 2006 mencapai 2,63 %. Pada tahun 2007 mengalami penurunan yaitu 2,04 % dan tahun 2008 hanya mencapai 1,77 %. Akan tetapi pada tahun 2009 terjadi peningkatan yaitu mencapai 3,14 %. Kemudian pada tahun 2010 kembali terjadi penurunan yaitu 2,33 %. Namun penerimaan retribusi pasar di Kota Palembang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan begitu juga dengan tingkat PAD.

Peningkatan penerimaan retribusi pasar ini disebabkan sejak dikeluarkannya Perda Kota Palembang No. 6 tahun 2005 tentang pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya yaitu mulai tahun 2006

pemungutan retribusi pasar yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pasar, selanjutnya diserahkan kepada PD.Pasar Palembang Jaya. Kemudian Perda Kota Palembang No. 6 tahun 2005 tersebut diperbaharui dengan Perda Kota Palembang No. 5 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar. Hal ini memberi dampak positif bagi Pemerintah Kota Palembang untuk menggali potensi penerimaan dari sektor ini. Karena sebelum dikeluarkan Perda tersebut pemungutan dari retribusi pasar belum dikelola oleh suatu instansi atau badan yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan fungsi pengelolaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan persaingan global serta menuntut pelayanan yang serba cepat dan transparan seiring dengan perkembangan Kota Palembang.

PD.Pasar Palembang Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Palembang yang bergerak di bidang pemasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu mengelola dan melakukan perkembangan pasar-pasar tradisional yang terdapat di Kota Palembang.

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah petak dan los di pasar tradisional sekota Palembang yang dikelola oleh PD.Pasar Palembang Jaya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Petak dan Los di Pasar tradisional sekota
Palembang yang dikelola oleh PD.Pasar Palembang Jaya

No	Nama Pasar	Jumlah Petak	Jumlah Los
1.	Cinde	692	176
2.	Bukit Kecil	128	48
3.	Padang Selasa	94	71
4.	Sekanak	230	32
5.	Tangga Buntung	93	30
6.	Soak Bato	65	155
7.	Gandus	16	0
8.	Burung	0	0
9.	Kamboja	32	58
10.	Km.5	297	160
11.	Kebon Semai	169	144
12.	Lemabang	434	217
13.	Kuto	234	324
14.	Sekip Ujung	85	324
15.	Kepandean	0	0
16.	16 Ilir	2091	1136
17.	Yada	125	140
18.	Kertapati	203	126
19.	10 Ulu	503	100
20.	7 Ulu	0	0
21.	3-4 Ulu	119	108
22.	Cakna	0	0
23.	1 Ulu	29	101
24.	Sentosa	32	0
25.	Klinik 7 Ulu	70	16
26.	Pasar Plaju	352	403
27.	Induk Jakabaring	320	105
28.	Multi Wahana	400	142
29.	Griva Musi Permai	102	136
30.	Lebung Gajah	9	166
31.	Alang-alang Lebar	360	408
32.	Pagi Km 7	92	50
33.	Pagi Km 5	407	9
34.	Asuransi Km 5	21	300
35.	Retail Jakabaring	838	125
36.	Simpang Kramasan	0	0
37.	Buah Jakabaring	77	120
38.	Pagi Lemabang Schati	38	774
39.	Pagi Lemabang BCA	0	0

Sumber : PD.Pasar Palembang Jaya Tahun 2011 (data diolah)



Dari Tabel 1.4 di atas dapat dilihat jumlah petak dan los yang terdapat di pasar-pasar tradisional sekota Palembang yang terdata dan dikelola oleh PD.Pasar Palembang Jaya. Setiap pasar mempunyai jumlah petak dan los yang berbeda. Jumlah petak dan los akan mempengaruhi jumlah pungutan retribusi pasar yang seharusnya diterima. Jumlah kios, dan los yang berbeda di setiap pasar ini akan menentukan potensi retribusi pasar dengan realisasi pendapatan pungutan retribusi pasar.

Oleh karena itu agar potensi retribusi pasar dapat sesuai dengan realisasi pendapatan retribusi pasar maka PD.Pasar Palembang Jaya harus bisa membuka dan memfungsikan seluruh los dan kios yang tutup dan yang tidak terpakai.

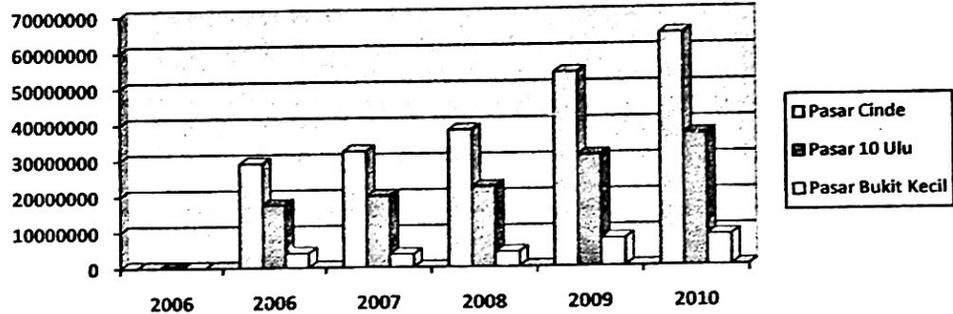
Ada beberapa pasar di Kota Palembang yang memiliki potensi dan memberikan kontribusi penerimaan yang selalu meningkat tiap tahunnya terhadap realisasi penerimaan retribusi pasar seperti di tunjukkan pada tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.5
Penerimaan dari beberapa pasar yang dikelola oleh PD.Pasar
Palembang Jaya Tahun 2006-2010
(Dalam Rp)

No	Penerimaan	Nama Pasar		
	Tahun	Pasar Cinde	Pasar 10 Ulu	Pasar Bukit Kecil
1	2006	291.186.435	175.248.664	39.803.690
2	2007	323.439.625	198.589.178	35.748.402
3	2008	381.539.600	223.946.591	41.203.380
4	2009	593.089.025	309.532.861	76.657.154
5	2010	645.419.016	367.381.350	84.230.811

Sumber : PD.Pasar Palembang Jaya Tahun 2011 (data diolah)

Gambar 1.3
Penerimaan dari beberapa pasar yang dikelola oleh PD.Pasar Palembang Jaya Tahun 2006-2010 (Dalam Rp)



Dari Tabel 1.4 di atas terlihat bahwa penerimaan dari ketiga Pasar tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penerimaan terbesar terdapat pada pasar Cinde, kemudian pasar 10 Ulu, dan pasar Bukit Kecil. Fluktuasi penerimaan penerimaan terjadi di pasar Bukit Kecil pada tahun 2007 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 39.803.690,00 menurun menjadi Rp 35.748.402,00. namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010, penerimaannya kembali meningkat.

Selain itu terdapat juga beberapa pasar tradisional yang memiliki jumlah petak, dan los lebih banyak dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional lainnya. Dari beberapa pasar tersebut ada beberapa pasar yang penerimaannya terus meningkat dan ada juga pasar yang mengalami fluktuasi penerimaan tiap tahunnya.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.5 berikut ini akan memperlihatkan penerimaan dari beberapa pasar tradisional dengan jumlah petak, dan los yang lebih banyak dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional lainnya.

Tabel 1.6
Penerimaan beberapa pasar tradisional yang memiliki jumlah petak dan los yang lebih banyak dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional lainnya :

No	Tahun	Nama Pasar		
		Pasar 16 Ilir	Pasar Lemabang	Pasar Retail Jakabaring
1.	2008	106.756.000	180.029.649	169.839.000
2.	2009	443.300.000	286.851.481	215.571.000
3.	2010	233.500.000	348.825.500	214.989.000

Sumber : PD.Pasar Palembang Jaya Tahun 2011 (data diolah)

Dari tabel 1.6 diatas terlihat bahwa dari ketiga pasar tersebut, pasar yang memiliki penerimaan yang meningkat setiap tahunnya adalah Pasar Lemabang. Pada tahun 2008 penerimaan Pasar Lemabang lebih besar dibandingkan penerimaan Pasar 16 Ilir dan Pasar Retail Jakabaring. Hanya saja pada tahun 2009 penerimaan terbesar terdapat pada Pasar 16 Ilir akan tetapi pada tahun 2010 penerimaan terbesar kembali terjadi di Pasar Lemabang. Sedangkan pada pasar 16 Ilir dan pasar Retail Jakabaring peningkatan penerimaan hanya terjadi pada tahun 2009, kemudian penerimaannya menurun pada tahun 2010.

Penerimaan pada Pasar Lemabang selalu meningkat tiap tahunnya dibandingkan dengan Pasar 16 Ilir dan Pasar Retail Jakabaring. Seharusnya penerimaan Pasar 16 Ilir dan Pasar Retail Jakabaring juga dapat meningkat setiap tahunnya dan dapat lebih besar penerimaannya daripada Pasar Lemabang karena banyaknya jumlah petak dan los yang terdapat di Pasar 16 Ilir dan Pasar Retail Jakabaring tersebut.

Hal ini disebabkan oleh pada pasar 16 ilir terdapat pihak yang bukan petugas dari PD. Pasar menarik pungutan kepada para pedagang kaki lima yang

terdapat di plataran pasar. Selain itu terdapat oknum aparat pemerintah yang harusnya mengawasi dan menjaga ketertiban para pedagang akan tetapi malah menarik pungutan kepada para pedagang di setiap kios, los, dan plataran sebesar RP. 20.000 setiap minggunya. Tentu saja hal ini di luar tugas dan menyalahi wewenang dari aparat pemerintah itu sendiri karena pengelolaan pungutan retribusi adalah tugas dan wewenang dari PD. Pasar Palembang Jaya seperti yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah Kota Palembang.

Kemudian di pasar retail jakabaring juga terdapat pihak yang menarik pungutan kepada para pedagang kaki lima di plataran pasar yang bukan petugas dari PD. Pasar Palembang Jaya. Selain itu kurangnya kesadaran membayar retribusi oleh para pedagang yang menempati petak, los, dan plataran menyebabkan petugas sulit untuk memungut retribusi kepada para pedagang dan akibatnya pemungutan retribusi tidak optimal.

Kemudian banyaknya pedagang di pasar Lemabang yang tidak tetap di petak, los, dan plataran pasar menyebabkan petugas sulit memungut retribusi karena ketika petugas hendak memungut retribusi ada beberapa pedagang yang sudah tidak menempati petak, los, dan plataran tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut kajian tentang retribusi pasar secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terutama potensi dari beberapa pasar di Kota Palembang yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang.

Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemda Kota

Palembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI BEBERAPA PASAR KOTA PALEMBANG”**.

I.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya penerimaan di beberapa pasar Kota Palembang?
2. Sejauh mana efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kota Palembang?
3. Apakah terdapat perbedaan potensi dan realisasi penerimaan retribusi pasar di beberapa pasar Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya penerimaan di beberapa pasar di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui adakah perbedaan potensi dan realisasi penerimaan retribusi pasar di beberapa pasar Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis agar hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau kontribusi bagi mahasiswa fakultas ekonomi pada umumnya dan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan pada khususnya mengenai retribusi pasar agar dapat memperoleh informasi lebih mengenai potensi dan penerimaan dari beberapa pasar di Kota Palembang yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang. Selain itu juga sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Operasional

Manfaat ini dapat diperoleh bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kajian dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan guna meningkatkan penerimaan retribusi pasar sebagai salah satu penerimaan daerah Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfafa, Jannatin. 2009. Analisis Retribusi Pasar Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surakarta.
(<http://www.google.com>, diakses 4 Januari 2012)
- Asngari, Imam. 2007. *Modul Praktikum Statistik Non Parametrik*. Palembang: Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2007. *Kota Palembang Dalam Angka*. Palembang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka*. Palembang.
- Davey, Kenneth.J. 1988. *Financing Regional Government*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang. 2010. *Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang Tahun 2006-2010*. Palembang: Dispenda.
- Dumairy.1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hayanto, Agus. 2006. *Pengaruh Manuver Kendaraan Parkir Badan Jalan Terhadap Karakteristik Lalu Lintas di Jalan Diponegoro Yogyakarta*. (<http://www.google.com>, diakses 23 Desember 2011)
- Kaho, J.Riwu. 1982. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Mangkoesobroto, Guritno.1997. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: UGM.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munawir,H. S. 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Musgrave, Richard. A. 1991. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nawi, Rusli 2003. Analisis pemanfaatan pasar tradisional dan pendapatan pedagang di Kota Palembang. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya (tidak dipublikasi).

- Peraturan Daerah Kota Palembang No 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, Walikota Palembang, Palembang.
- Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.2011. *Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi, dan perkembangan pasar Tahun 2006-2010*. Perusahaan Daerah: Palembang.
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*”
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*”
- Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*”
- Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Makara, Sosial Humanira, Vol 7, No. 2, Desember 2003. Jakarta: UI.
- Slamet, Rokhmad. 2004. *Analisis daya tarik dan strategi manajemen pasar tradisional, Jurnal Ilmiah Ekonomi Akuntansi Manajemen, Vol 8, No. 3*, STIE Pelita Bangsa, Bekasi.
- Soedargo. 1992. *Retribusi dan Perpajakan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparmoko, Muhammad. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Susetyo, Didik, 2007, “Upaya Fiskal dan Transfer Fiskal Dalam Otonomi Daerah (Studi Empirik Keuangan Kabupaten/Kota di Indonesia)”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9, No.2 Desember 2007.